

**RESPON MASYARAKAT KULON PROGO TENTANG
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Sosial

Disusun Oleh :

Siti Rika Kusnariningsih

06720034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rika Kusnariningsih
NIM : 06720034
Prodi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2011



Siti Rika Kusnariningsih
NIM. 06720034



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Rika Kusnariningsih

NIM : 06720034

Judul Skripsi : "RESPON MASYARAKAT KULON PROGO TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Juni 2011

Pembimbing

Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

NIP. 19750312 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/1029/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Respon Masyarakat Kulon Progo Tentang Keistimewaan Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Rika Kusnariningsih
NIM : 06720034
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2011
dengan nilai : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Syarifudin Jurdy, M.Si
NIP. 19750312 200604 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Musa, M.Si
NIP. 19620912 199203 1 001

Ambar Sari Dewi, M.Si
NIP. 19761210 200801 2008

Yogyakarta, 15 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
DEKAN



Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1010

MOTTO

- ✓ *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (2s. Ibrahim:7)*
- ✓ *Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha*
- ✓ *Ujian dan cobaan adalah proses pendewasaan diri*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. *Almamater tercinta Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
2. *Ayah dan Ibuku tersayang, yang telah membesarkan aku, mendidikku, membiayai sekolahku, yang selalu mengajarku kesabaran dan selalu memberikan kasih sayang tulus untukku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahillobbil'alamin. Puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya, studi ini bisa dianggap “selesai”. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia.

Proses penyusunan skripsi ini banyak sekali melibatkan orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini, tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- ❖ Bapak Prof. Dudung Abdurahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. dan bapak Drs. H. Musa, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi arahan serta bimbingannya.
- ❖ Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta utamanya Program Studi Sosiologi, atas semua transformasi keilmuan di ruang kuliah yang selama ini berlangsung.

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta, kakak tercinta yang tanpa henti selalu memberikan doa, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Nasrul Himam yang telah memberikan motivasi yang sangat berarti dalam hidup penulis.
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku, mb cimuth, Eka, Elmi, Rina, Atun, dan semua warga kost Popongan (ferdi, Imam, Lutfi, Yuan dll) terima kasih banyak atas dukungan dan bantuannya, teman-teman satu angkatan prodi sosiologi, saya bangga telah menjadi bagian dari kalian.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang tersusun ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, yang disebabkan oleh kelemahan serta terbatasnya pengetahuan dan materi yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya dan seluruh pembaca pada umumnya, dan semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Yogyakarta, 22 Juni 2011

Penyusun,



Siti Rika Kusnariningsih
NIM. 06720034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
D. Tinjauan Pustaka.....	18
E. Landasan Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keistimewaan Yogyakarta dalam Lintasan Sejarah.....	31
1. Yogyakarta di Bawah Rezim Belanda.....	32
2. Yogyakarta pada Masa Pendudukan Jepang.....	34
3. Yogyakarta Sejak Kemerdekaan.....	38
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Sosial Budaya.....	47
3. Kondisi Ekonomi.....	50
4. Tingkat Pendidikan.....	53
5. Kondisi Politik.....	54
BAB III PERBANDINGAN DAERAH ISTIMEWA DI INDONESIA	
A. Daerah Istimewa di Indonesia.....	57
1. Nanggroe Aceh Darussalam.....	58
2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	73
3. Papua.....	77
B. Kedudukan Keistimewaan Yogyakarta diantara Daerah Istimewa Lain.....	83
BAB IV RESPON MASYARAKAT KULON PROGO TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	
A. Kebijakan Negara Mengenai Keistimewaan Yogyakarta.....	91
1. Pemerintah Meneliti Keistimewaan.....	92
2. Munculnya RUU Keistimewaan.....	96

B. Dinamika Keistimewaan Yogyakarta.....	100
1. Isu Politik.....	100
2. Isu Kemerdekaan NKRI.....	103
3. Isu Pilgub	107
C. Respon Masyarakat terhadap Keistimewaan.....	110
1. Respon terhadap Jakarta.....	111
2. Respon terhadap Wacana Pilgub	115
3. Respon terhadap RUUK.....	126
D. Kaitannya dengan Konsep Demokrasi	130
E. Masa Depan Keistimewaan Yogyakarta Pasca RUU.....	133
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Daerah Istimewa merupakan daerah yang berbeda dengan daerah lain, dalam artian daerah istimewa memiliki aturan perundang-undangan sendiri dalam mengatur pemerintahan, namun tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia selain Aceh, Jakarta dan Papua. Yang masing-masing mempunyai aturan keistimewaan yang berbeda satu sama lain. Status keistimewaan tersebut sudah ada sejak sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan.

Pengkajian terhadap keistimewaan Yogyakarta tentang respon masyarakat merupakan salah satu upaya pemaknaan kembali terhadap kata “istimewa” yang melekat pada DIY selama ini. Pemaknaan kembali ketika status istimewa mulai dipertanyakan bahkan dirubah Rancangan Undang-undangnya.

Studi ini membandingkan beberapa daerah istimewa di Indonesia. Membandingkan bahwa terdapat empat daerah istimewa di Indonesia yang masing-masing diatur dalam aturan perundang-undangan. Serta menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan respon masyarakat, hasil studi ini menunjukkan bahwa keistimewaan Yogyakarta tetap harus dipertahankan dengan mekanisme penetapan Gubernur DIY dan dengan mempertimbangkan aspek historis, politis, demokratis dan sosiologis. Karena Yogyakarta merupakan gerbang keutuhan NKRI sehingga Yogyakarta mempunyai arti besar terhadap kemerdekaan Indonesia dan keutuhan NKRI sejak jaman sejarah. Maka ketika keistimewaan Yogyakarta dibahas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka banyak respon positif dan negatif dari seluruh kalangan masyarakat. Terutama masyarakat Kulon Progo yang *notabennya* adalah salah satu kabupaten di DIY. Presiden SBY menghendaki adanya pemilihan gubernur DIY secara langsung karena sistem penetapan yang ada di Yogyakarta dinilai tidak demokratis karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Presiden kurang memahami sejarah tentang Indonesia, sehingga sesuatu yang seharusnya tidak dipertanyakan menjadi topik besar di Indonesia. Masyarakat tidak setuju kalau alasannya demokrasi karena Yogyakarta merupakan gerbang demokrasi Indonesia. Walaupun tidak melaksanakan pemilu secara langsung namun secara prakteknya Yogyakarta merupakan contoh sistem demokrasi di Indonesia.

Keywords: Keistimewaan Yogyakarta, mekanisme pengisian jabatan, respon masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses demokratisasi Indonesia yaitu ditandai dengan jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto dengan Orde Barunya pada tahun 1998. Sejak jaman Orde Baru sampai masa sebelum reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia berbasis kepada sistem yang sentralistik.¹ Dengan kata lain, hampir semua kebijakan dipegang oleh Pemerintah Pusat, dan kebijakan yang bertahun bertahun tersebut dianggap tidak demokratis, karena tidak banyak melibatkan rakyat di dalam pengambilan keputusan. Sistem yang sentralistik mendapat berbagai kritikan yang cukup tajam, dan puncaknya terjadi pada masa reformasi tahun 1998, sehingga munculah suatu gagasan untuk mengamandemen UUD 1945, agar tercipta suatu pemerintahan yang lebih demokratis. Sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan azas otonomi daerah.

Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai status istimewa dari beberapa daerah yang ada di Indonesia selain NAD, Jakarta dan Papua. Karena Yogyakarta menganut sistem kerajaan yang dipimpin secara turun temurun. Dinamika politik sejarah zaman Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono I hingga Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan alur sejarah kehidupan sosial, politik, dan budaya atas kekuasaan Mataram.

¹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 5.

Perjalanannya senantiasa mengalami gelombang pasang surut kekuasaan, masing-masing kekuasaan melahirkan pemimpin yang “Tanggap Ing Sasmita” yaitu pemimpin atau seorang raja yang senantiasa tanggap akan tuntutan zaman, itulah sesungguhnya keistimewaan Yogyakarta.² Hamengku Buwono X sebagai pewaris kekuasaan dalam jajaran pemerintah daerah atau Gubernur yang sekaligus merupakan sultan di Yogyakarta. Hal ini, sama halnya seperti Hamengku Buwono IX yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur dan sekaligus raja. Sementara Sri Paku Alam merupakan wakil dari Hamengku Buwono baik sebagai Gubernur maupun raja.

Selama ini, adanya penyatuan lembaga pemerintahan dengan kraton merupakan suatu yang membuat kerancuan dalam proses demokratisasi dalam menggunakan pendapat secara leluasa. Ketika adanya suatu kinerja pemerintah yang dianggap kurang baik dan ingin dikritisi oleh masyarakat maka hal yang akan dikritisi bukan hanya Gubernur sebagai jabatan kepala daerah melainkan sekaligus sebagai raja atau sultan. Budaya yang terdapat di Yogyakarta memandang bahwa saat ini keturunan Hamengku Buwono merupakan pengayom masyarakat Yogyakarta yang sekian lama membimbing masyarakatnya sehingga masyarakat percaya segala tindakan yang dilakukan oleh keturunan Hamengku Buwono bukan hanya untuk membawa masyarakatnya menuju kesejahteraan melainkan juga untuk melindungi masyarakat Yogyakarta.

² Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004), hlm. 11.

Keadaan yang seperti ini menciptakan terhentinya proses timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya pertimbangan diatas maka perlu bagi kita memisahkan antara jabatan sebagai kepala daerah dengan jabatan sebagai sultan atau raja di Yogyakarta sehingga proses timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya tercipta dengan baik. Tujuannya adalah ketika pemerintah dan masyarakat berjalan seiringan maka proses memajukan dan mensejahterakan daerah dapat berjalan secara efektif. Kemunculan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) yang mulai dibentuk pada tahun 2002 merupakan sarana alternatif dalam mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

Substansi keistimewaan DIY menurut draf RUUK dilekatkan secara kumulatif pada empat bidang penting, yakni politik, pemerintahan, kebudayaan, dan pertanahan termasuk tata ruang.³ Di bidang politik dan pemerintahan, draft RUUK menegaskan pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa. DIY juga diusulkan memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan pokok terletak pada pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dan sekaligus pemisahan antara wewenang dan struktur pengelola urusan politik dan pemerintahan sehari-hari dengan urusan politik strategis.

³ <http://www.jpnn.com/read/2010/11/29/78308/Keistimewaan-Jogja-Bukan-Bentuk-Monarki->, diakses Januari 2011.

Pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman ke dalam struktur pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui pemberian wewenang, berikut implikasi-implikasi yang melekat di dalamnya kepada Sultan dan Paku Alam sebagai satu kesatuan politik yang diposisikan sebagai Parardhya Keistimewaan.⁴ Parardhya adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵ Sultan dan Paku Alam hanya akan dijadikan simbol pemersatu keberagaman masyarakat Yogyakarta.⁶

Kewenangan istimewa di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang diwujudkan melalui kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan dalam merumuskan Peraturan Daerah Istimewa tentang ketiga urusan itu. Parardhya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pelestarian serta pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya. Sedangkan dalam bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond. Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara khusus status hukum Kesultanan dan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Harian Kompas*, edisi Kamis 27 Januari 2011, hlm. 12.

Pakualaman sebagai Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak kepemilikan atas tanah dan aset lainnya.⁷

Sultan dan Paku Alam sebagai Parardhya berwenang dalam memberikan arah umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang diajukan DPRD dan Gubernur. Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang penataan ruang. Kewenangan Parardhya juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY.⁸ Draf yang terdapat dalam rancangan UU tersebut lahir dari akumulasi data aspirasi masyarakat yang terkumpul dalam waktu sangat lama. Selain itu juga melibatkan keterangan dan kehadiran berbagai aktor strategis, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, politisi, aktivis LSM, akademisi, dan tentu saja tokoh-tokoh dari Pura Pakualaman dan Keraton Yogyakarta.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa draf tersebut sesungguhnya milik masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta memiliki nilai-nilai kekhasan yang masih hidup dan berpotensi akan terus tetap hidup di dalam masyarakat Yogyakarta, yaitu masyarakat masih menghormati dan menghendaki bahwa Gubernur Yogyakarta berasal dari Raja Kasultanan Yogyakarta, dan Wakil Gubernur Yogyakarta berasal dari Raja Kadipaten Paku Alam. Jadi isi dan jenis otonomi daerah bagi Yogyakarta tidak harus sama dengan daerah lainya.

⁷ <http://www.jpnn.com/read/2010/11/29/78308/Keistimewaan-Jogja-Bukan-Bentuk-Monarki-> diakses Januari 2011.

⁸ *Ibid.*

Melekatnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta pada Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam adalah sudah menjadi tradisi dan budaya yang hidup sampai saat ini di dalam masyarakat Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, pada intinya berisi bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia, yang kekuasaannya dipegang oleh kedua Raja tersebut, serta pertanggung jawabannya bersifat langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Amanat 5 September 1945 adalah kontrak politik Yogyakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kontrak politik tersebut didukung oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan piagam kedudukan untuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 6 September 1945, yang ditanda tangani oleh Presiden Soekarno.⁹

Keistimewaan Yogyakarta dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Yogyakarta masih hidup sampai saat ini. Yogyakarta memiliki nilai *kearifan lokal* yang mesti dihargai, Yogyakarta memiliki nilai-nilai musyawarah tradisional dan tradisi kedekatan antara rakyat dan Sultannya. Penduduk Yogyakarta hidup bagaikan dalam sebuah paguyuban, dan Sultan sebagai ketua paguyubannya. Nilai *adiluhung* hubungan antara rakyat dan pemimpin (Sultan), yang sekaligus sebagai pelindung, sampai saat ini masih dirasakan dikalangan rakyat Yogyakarta, dan semua itu dikhawatirkan akan dapat ternodai dengan diselenggarakannya Pemilu. Walaupun

⁹ Parwi Foundation, *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit Parwi Foundation, 2002), hlm. 27.

pelaksanaan demokrasi secara prosedural mengikuti UU No. 32 Tahun 2004, yang menghendaki pemilihan kepala daerah dengan Pemilukada secara langsung oleh rakyat, belum tentu akan mencapai tujuan demokrasi secara substansial.

Sejak bulan November tahun lalu, sudah menjadi rahasia umum bahwa keistimewaan Yogyakarta mulai 'diotak atik' oleh pemerintah lewat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY mengatakan bahwa sistem pemerintahan Yogyakarta mirip monarki, tentunya hal ini banyak mendapat respon positif maupun negatif. Dalam artian tetap mendukung keistimewaan Yogyakarta dengan mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maupun yang mendukung adanya pemilihan Gubernur DIY. Namun adapula masyarakat yang menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pemerintah, artinya mereka tidak merespon apapun tentang polemik tersebut, asal keputusan pemerintah tidak merugikan rakyat terutama masyarakat Yogyakarta tentu mereka akan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah tersebut.

Banyak pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu dengan memposisikan Yogyakarta tetap sebagai daerah istimewa dengan membedakan posisi Sultan dan Gubernur. Pemerintah tetap mendukung keistimewaan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan, akan tetapi untuk Gubernur DIY tetap mendukung adanya mekanisme pemilihan. Keistimewaan Yogyakarta menurut Presiden SBY harus dilandaskan pada tiga pilar. Pertama, memasukkannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Kedua, mengakui keistimewaan Yogyakarta dengan memasukkannya dalam struktur pemerintahan daerah itu. Ketiga, tidak mengabaikan prinsip demokrasi.¹⁰

Respon yang muncul bukan hanya dari masyarakat Yogyakarta sendiri melainkan seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang menilai bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seolah mengabaikan pesan konstitusi tentang kekhususan dan keistimewaan Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Negara Indonesia yang selama ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah di Yogyakarta, dan Sultan telah menjalankan tugas, peran, fungsi, dan kewajibannya sebagaimana kepala daerah lain. Perangkat daerah di Yogyakarta juga tidak berbeda dengan provinsi lain. Yaitu dalam pemerintahannya ada Sekda, kepala dinas, pengawasan DPRD, perda sebagai produk legislatif, dan penyusunan APBD. Yang berbeda, hanya dalam tata cara penetapan kepala daerah. Namun, itu juga sudah mendapatkan legitimasi dari negara.

Kehendak mayoritas warga Yogyakarta, penentuan gubernur Yogyakarta sebaiknya tetap mempertahankan mekanisme penetapan. Dan UUD 1945-pun telah menyatakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satu-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Akan tetapi gaya monarki Yogyakarta menurut mereka bukanlah politis, tapi sebatas kultural. Dengan harapan sejarah integrasi kesultanan dan pakualaman ke NKRI tetap dihormati. Namun Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja dan sekaligus gubernur DIY menanggapi kalimat “Monarki”

¹⁰ Harian *Kompas*, edisi Kamis 27 Januari 2011, hlm. 12.

seperti yang disebutkan SBY, memberikan tanggapan yang sangat santun dengan pernyataan bahwa beliau siap meletakkan Jabatan Gubernur ini, bila memang SBY merasa perlu untuk mengambil alih, dan semenjak perkataan monarki ini keluar protes rakyat DIY terus berlangsung bahkan ratusan warga Yogyakarta melakukan demo di depan gedung DPR RI untuk mendukung Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan sekaligus Sultan Yogyakarta.¹¹

Jika menyimak polemik tersebut, telaah kesejarahan merupakan pembahasan yang menarik dan gambling disajikan oleh para pakar. Tidak ada satupun yang memungkiri peran penting pemerintahan DIY sekaligus Keraton maupun Pura Pakualaman dalam perjalanan 66 NKRI. Sebagai Negara berdaulat, Ngayogyakarta Hadiningrat telah meningkatkan posisi tawar dan penghargaan dunia internasional diawal kelahirannya dengan pengakuan dan penggabungannya dalam NKRI. Tidak hanya itu, dalam menjaga eksistensi NKRI, Yogyakarta mampu untuk memberikan kepercayaan diri di tengah keterpurukan era pasca kemerdekaan yang penuh dengan gejolak. Tetapi seringkali atas nama modernisasi dan demokratisasi nilai-nilai itu dikaburkan atau bahkan diabaikan.

Para pendiri bangsa dengan kearifan dan kejernihan memiliki landasan kajian yang kuat dalam menyusun konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, memberikan penghargaan atas adanya satu kesatuan adat yang telah ada dan berkembang sebelum republik ini berdiri, tentunya dengan

¹¹ <http://nasional.inilah.com/read/detail/1039312/tolak-pilgub-yogya-massa-lumpuhkan-malioboro>, diakses Januari 2011.

semangat persatuan dan kesatuan. Sedangkan yang terjadi di Yogyakarta, Setelah mendengar dan memperhatikan kehendak rakyat, Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka Paku Alam VIII pada hari yang sama. Dekrit inilah yang dimaksudkan sebagai “ijab Kabulnya” pemerintahan DIY dengan NKRI.

Status keistimewaan tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU 22/1948. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi bukan sebuah provinsi. Walaupun secara praktiknya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal kepada daerah dan wakil kepala daerahnya. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional.

Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen pun memberikan penghargaan keberadaan status keistimewaan pada Yogyakarta, DKI, NAD dan Papua. Memang benar bahwa Papua dan NAD sangat kaya dengan hasil tambangnya, DKI merupakan pusat pemerintahan. Tetapi perlu diingat bahwa Yogyakarta merupakan benteng terakhir kebudayaan, yang merupakan Indonesia sesungguhnya dalam wujud kecil, yang dihuni beragam suku, agama maupun etnis, yang mengakui dan merasakan peran institusi keratin dalam menjaga pluralitas dan ketentraman.

Sebagai bentuk perlawanan warga Yogyakarta terhadap SBY mereka akan melawan bahkan DPR pun akan mendukungnya. Bahkan Sultan pun saat SBY berkantor di Yogyakarta untuk memonitor Gunung merapi tidak menemani SBY di Istana, melainkan membaaur dengan rakyat diposko penampungan untuk memberikan semangat dan tidur beralaskan tikar, demikian juga halnya dengan Ratu Hemas, sibuk didapur umum memasak dan membungkus nasi untuk pengungsi.

Bentuk dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta ditunjukkan lewat aksi. Aksi pendukung keistimewaan Yogyakarta di Malioboro, menurut referensi yang penulis temukan, pagi itu pada hari Rabu (8/12/2010) masa pendukung Keistimewaan Yogyakarta melumpuhkan jalan Malioboro. Ribuan massa itu menagih janji yang diberikan DPRD DI Yogyakarta dalam menggelar rapat paripurna untuk memutuskan sikap mendukung penetapan Gubernur.¹² Massa pro penetapan yang datang dari empat Kabupaten di DI Yogyakarta yakni Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul, mulai melakukan aksinya sekitar pukul 10.00 WIB.

Ribuan massa ini berangkat dari dua titik yang berbeda yakni berkumpul di berkumpul di Alun-Alun Utara Yogyakarta di sisi selatan Jalan Malioboro dan berjalan kaki ke arah utara melawan arah menuju Kantor DPRD DIY. Sementara sebagian lagi berkumpul di Taman Parkir Abu Bakar Ali untuk kemudian bergerak ke arah selatan. Akibatnya Jalan Malioboro lumpuh dan berubah menjadi lautan massa yang berjalan kaki menuju gedung DPRD DIY. Mereka datang untuk menagih janji dari DPRD tentang sikap

¹² *Ibid.*

DPRD terhadap Keistimewaan Yogyakarta. Apakah mereka (DPRD) akan mendukung penetapan langsung dalam memilih Gubernur atau melalui proses pemilihan melalui Pilkada. Hari Rabu sebelumnya (1/12/10) mereka telah mendatangi DPRD DIY, dan hasilnya akan diputuskan dalam waktu satu minggu. DPRD DIY diminta bisa tegas dalam bersikap atau masyarakat Yogyakarta mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi.¹³

Pada hari Minggu (12/12/10) malam, sekitar 20 ribu warga dari seluruh wilayah Kabupaten Yogyakarta sudah menyatakan siap berunjuk rasa dan mengikuti sidang rakyat menuntut penetapan keistimewaan Yogyakarta. Jumlah ini masih terus bertambah, hari itu, perwakilan anggota paguyuban lurah dan dukuh se-Yogyakarta menggelar rapat terakhir. Rapat digelar di posko markas komando keistimewaan di kawasan Wijilan, Yogyakarta.

Pada keesokan harinya yakni hari Senin (13/12/2010) ribuan masyarakat Yogyakarta telah memadati Alun Alun Utara Yogyakarta, untuk menyatakan dukungannya terhadap Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya mereka bergerak berjalan kaki melawan arus lalu lintas Jalan Malioboro menuju kantor DPRD Yogyakarta. Target dari aksi besar-besaran ini adalah keluarnya putusan hasil rapat DPRD yang isinya rakyat Yogyakarta sepakat dilakukan penetapan gubernur dan wakil gubernur dalam keistimewaan Yogyakarta. Hasil rapat nantinya akan dikirim ke Presiden serta DPR pusat agar mereka memahami aspirasi rakyat Yogyakarta

¹³ *Ibid.*

yang sebenarnya terkait polemik Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta.¹⁴

Mereka mengenakan baju daerah lengkap dengan keris yang terselip di pinggang. Warga mengekspresikan penampilan itu sebagai kesiapan untuk "perang".¹⁵ Massa tersebut berjalan kaki menuju dari Alun - Alun Utara Yogyakarta menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sikap anggota dewan terhadap Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) dalam rapat Paripurna yang digelar Senin (13/12/2010).

Elemen masyarakat Yogyakarta itu di antaranya dari Paguyuban Kepala Desa Yogyakarta, Paguyuban Kepala Dukuh Yogyakarta, dan Paguyuban Tukang Becak dan Wisata Yogyakarta, Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJJJ). Mereka berharap kepada Jakarta terutama kepala negara Indonesia supaya tetap mendukung keistimewaan Yogyakarta dengan mekanisme penetapan Gubernur. Perjuangan tidak akan berhenti sampai penetapan dilaksanakan. Kalau tidak ditetapkan, kita akan menetapkan sendiri penetapan ini. Mereka akan melakukan *de facto* sendiri, dan mereka akan membuat peraturan pemerintahan sendiri.¹⁶

Terkait aksi massa tersebut, selaku adik dari Sultan menyatakan dukungannya terhadap aksi yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta, bahkan dia pun ikut berpartisipasi turun ke jalan bersama ribuan masyarakat

¹⁴ <http://liputan6.com/13/12/2010/dua-puluh-ribu-warga-yogyakarta-siap-demo>, diakses Januari 2011.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <http://nasional/13/12/2010/alun-alun-dipadati-ribuan-warga-yogya>, diakses Januari 2011.

Yogyakarta lainnya. Ribuan warga tersebut datang untuk menyaksikan rapat paripurna dewan terbuka di alun-alun selatan. Mereka meminta pemerintah tetap menetapkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY. Ratusan siswa pun hadir dalam rapat itu. Meski masih mengenakan seragam sekolah, para siswa tetap berpartisipasi menyuarakan keprihatinan atas nasib Yogyakarta. Aksi besar-besaran itu untuk menanggapi polemik Yogyakarta yang dianggap pemerintah pusat sebagai monarki dan melanggar demokrasi.¹⁷

Sementara di tempat lain, bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di depan rumah warga di Yogyakarta, Senin (13/12/2010). Warga mengaku pengibaran itu sebagai tanda prihatin atas polemik status Yogyakarta yang tak kunjung usai. Antusiasme mengibarkan bendera setengah tiang di depan rumah dengan harapan pengibaran itu dapat memicu penyelesaian status Yogyakarta. Pengibaran bendera setengah tiang itu dimulai Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto di kediamannya. Ia pun membacakan puisi yang menyatakan keprihatinan atas nasib Yogyakarta.¹⁸

Sikap berbeda ditunjukkan oleh mantan Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal, karena menganggap bahwa aksi rakyat Yogyakarta tersebut sebagai gerakan yang mirip dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Siang itu, hari Kamis (23/12/2010) masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Kawulo Ngayogyakarta Hadiningrat, mendatangi rumah mantan Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal di Pandean Sari I/5 Condongcatur Sleman. Puluhan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <http://liputan6.com/13/12/2010/dua-puluh-ribu-warga-yogyakarta-siap-demo>, diakses Januari 2011.

orang berpakaian Jawa tersebut meminta mantan Rektor UGM itu meminta maaf kepada rakyat Yogyakarta karena telah menyebut aksi rakyat sebagai gerakan yang mirip dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁹

Menurut mereka, Kalau Pak Prof Amal tidak suka dengan orang Yogyakarta, apalagi kepada Sultan, sebaiknya tidak perlu tinggal di Yogyakarta. Mereka sangat sakit hati dan meminta Pak Amal untuk segera meminta maaf kepada warga secara terbuka di media masa. Meski Ichlasul Amal tidak berada di rumahnya, warga yang berusaha menyampaikan perasaan mereka sambil duduk di pelataran gang.²⁰ Mereka mempertanyakan, apa maksud pernyataan Pak Ichlasul Amal yang menyebut pendukung Kraton sebagai PKI. Padahal menurut mereka, mereka tidak bertindak anarkis, menculik pejabat serta mendirikan negara sendiri. Massa juga mengancam, jika Ichlasul Amal tidak segera meminta maaf, maka warga akan datang dan menuntut terus, sampai Ichlasul Amal benar-benar meminta maaf dan menarik ucapannya.²¹

Dalam kenyataannya seluruh elemen masyarakat Yogyakarta sangat mendukung kepemimpinan Sri Sultan dan Paku Alam. Dan tentang administrasi kepemimpinan di Yogyakarta tidak ada yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono dari zaman Belanda hingga zaman akhirpun akan tetap menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Yogyakarta, bahkan rakyat Indonesiapun sangat hormat terhadap Sultan ini,

¹⁹ <http://nasional/23/12/2010/warga-desak-ichlasul-amal-minta-maaf>, diakses Januari 2011.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

bukan karena darah birunya melainkan sikap dan perilaku hidupnya sungguh menjadi panutan bagi rakyatnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Sleman, Bantul dan Kulon Progo. Dan Kulon Progo ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama *Kulon Progo* berarti sebelah barat Sungai Progo (kata *kulon* dalam Bahasa Jawa artinya *barat*). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Dari ke empat kabupaten di Yogyakarta, Kulon Progo merupakan kabupaten yang melakukan perbaikan struktur pemerintahan, dari system yang kurang terstruktur menjadi terstruktur. Perbaikan yang dilakukan demi tercapainya *good governance* dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kulon Progo menimbulkan perubahan alur birokrasi yang lebih spesifik. Secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini akan menimbulkan perubahan dalam sistem dan struktur di tingkat aparat pemerintahan yang berimbas pada komunitas masyarakat.

Masyarakat Kulon Progo terdiri dari masyarakat pribumi dan pendatang. Dalam artian ada yang lahir dan besar di Kulon Progo, banyak pula masyarakat yang berasal dari luar kota yang kemudian berdomisili dan ber-KTP Kulon Progo. Dalam hal berpolitik, secara garis besar dukungan tentang keistimewaan Yogyakarta dan mekanisme penetapan Gubernur berasal dari masyarakat Kulon Progo. Namun, tidak sedikit dari masyarakat

Kulon Progo yang mempunyai kesadaran berpolitik yang masih rendah, sebab dari hasil pengamatan sementara, ada beberapa kalangan masyarakat yang terkesan tidak peduli tentang persoalan polemik seputar keistimewaan Yogyakarta tersebut. Sehingga penulis ingin lebih jauh mengetahui respon masyarakat Kulon Progo secara menyeluruh tentang keistimewaan Yogyakarta berikut mekanismenya.

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk mengetahui respon masyarakat Kulon Progo terhadap keistimewaan Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang lebih dalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul :

“RESPON MASYARAKAT KULON PROGO TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat Kulon Progo terhadap keistimewaan Yogyakarta?
2. Bagaimana respon masyarakat Kulon Progo terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan kaitannya dengan konsep demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui respon masyarakat Kulon Progo terhadap keistimewaan Yogyakarta.
2. Mengetahui respon masyarakat Kulon Progo terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan kaitannya dengan konsep demokrasi.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat dalam memahami keistimewaan Yogyakarta.
2. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa Ilmu sosial pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai keistimewaan Yogyakarta bisa dikatakan sudah banyak ditemukan karena pembahasan ini aktual dan masih hangat-hangatnya dibicarakan oleh sebagian banyak orang. Namun berbeda dengan penelitian lain, karena penelitian ini difokuskan pada respon masyarakat Kulon Progo tentang keistimewaan Yogyakarta. Ada beberapa skripsi ataupun buku yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding dalam penyusunan skripsi yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah:

Pertama, dalam skripsi karya Amir Kusbandono dengan judul *Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Secara Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta*,²² skripsi ini membandingkan tentang nilai-nilai demokrasi pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ke istimewaan Yogyakarta dan menjelaskan tentang UUD 1945 yang terkait dengan proses pemilihan secara langsung maupun penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Yogyakarta secara tekstual. Skripsi ini dapat dijadikan acuan penulis terkait dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta kaitannya dengan konsep demokrasi.

Kedua, pada sebuah penelitian karya : Darto Harnoko, dkk dengan judul *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah (Studi Kasus di DIY 1945-Awal Reformasi)*,²³ penelitian ini membahas tentang demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ungkapan ini secara tegas menunjuk bahwa kunci dari demokrasi adalah rakyat. Pengertian itu sangat romantik sekaligus normatif. Penelitian ini merekomendasikan bahwa proses demokratisasi di DIY yang berkaitan dengan prinsip otonomi yaitu mengandalkan prakarsa dan partisipasi rakyat tentu harus diwujudkan dengan jalan membuka saluran politik yang ada, sehingga rakyat benar-benar dapat ikut serta dalam proses pengembalian kebijakan publik, karena itu hak-hak politik rakyat harus diperbesar sehingga ketika rakyat memanfaatkan politiknya tidak dicekam ketakutan. Prinsip ini pada dasarnya mengisyaratkan perlunya perubahan pada institusi legislatif agar bisa mempunyai warna baru.

²² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

²³ Darto Harnoko, dkk. *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah (Studi Kasus di DIY 1945-Awal Reformasi)*, (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan & Pariwisata, 2003).

Dan kaitannya dengan penelitian ini yakni dapat dijadikan pembandingan dalam penelitian ini, dilihat dari gambaran demokrasi dan kondisi rakyat mengenai politik pada masa itu.

Ketiga, dalam buku yang berjudul *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*, yang ditulis oleh Heru Wahyukismoyo.²⁴ menurut buku ini, ketika demokratisasi bergulir seiring dengan sistem desentralisasi di negeri ini, wacana keistimewaan akan selalu diperbincangkan, khususnya untuk membahas eksistensi prosedural dan substantif. Akhirnya “keistimewaan” bisa jadi mitos yang mampu membius masyarakat Yogyakarta semakin primordial atau justru semakin sadar akan makna demokrasi. Nilai-nilai demokrasi memiliki hubungan yang signifikan apabila disandingkan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta. Nilai-nilai demokrasi menjadi bagian dari budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Yogyakarta, demokrasi menjadi praktek dalam kehidupan walau tidak terucap dan terumus secara universal. Kaitannya dengan penelitian ini, buku ini dapat dijadikan acuan terkait keistimewaan Yogyakarta secara historis.

Ke empat, dalam buku yang berjudul *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, yang ditulis oleh Kaoy Syah dan Lukman Hakiem.²⁵ Buku tersebut menjelaskan tentang sejarah dari keistimewaan Aceh, mulai dari Islam sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh sampai terbentuknya Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Kontribusi yang didapat

²⁴ Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004).

²⁵ Kaoy Syah, dan Lukman Hakiem. *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2000).

penulis dari buku ini dapat dijadikan sebagai pembanding tentang Daerah Istimewa di Indonesia selain Yogyakarta yakni Aceh.

Ke lima, dalam buku yang berjudul *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, yang ditulis oleh Muslim Zainuddin, dkk.²⁶ Buku ini berisi kumpulan beberapa artikel tentang perubahan sosial yang ada di Aceh. Kaitannya dengan penelitian ini, beberapa artikel tersebut dapat dijadikan pembanding untuk melakukan penulisan terkait perubahan sosial di Yogyakarta.

Beberapa karya diatas sebagian besar memberi kontribusi tentang keistimewaan Yogyakarta dan sebagai perbandingan tentang daerah istimewa lain di Indonesia sebagai contoh yakni Aceh. Dalam tinjauan pustaka yang terakhir, buku tersebut hanya digunakan sebagai pembanding tentang perubahan sosial yang terjadi di Aceh yang kemudian dibandingkan dengan perubahan sosial di Yogyakarta.

Dari berbagai penelitian tersebut hampir tidak terlihat adanya karya yang menyentuh mengenai respon masyarakat terlebih mengenai respon mengenai persoalan keistimewaan Yogyakarta berikut mekanisme yang banyak didukung oleh masyarakat tentang pasangan Gubernur dan Wagub DIY, baik respon positif maupun negatif. Maka dari hal inilah penelitian ini mencoba meneliti pada variabel yang berbeda yaitu meneliti respon masyarakat tentang persoalan sosial politik yang berkembang saat ini.

²⁶ Muslim Zainuddin, dkk. *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006).

E. Landasan Teori

Teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini yang *pertama* adalah tentang partisipasi politik. Konsep partisipasi politik menjadi penting pada masa demokrasi sekarang. Partisipasi politik dianggap sebagai syarat dari berkembangnya demokrasi. Menurut Meriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.²⁷

Menurut Huntington dan Nelson bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan;
2. Kegiatan yang ditujukan untuk mencari dukungan bagi atau terhadap suatu usul legislatif atau administratif tertentu;
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah;
4. Tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang;

²⁷ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik.. Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 129.

5. Tindakan kekerasan juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik. Kekerasan yang ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik.²⁸

Kaitannya dengan penelitian ini adalah partisipasi rakyat Yogyakarta yang pro maupun kontra tentang polemik keistimewaan Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan beberapa aksi yang dilakukan warga sebagaimana yang telah penulis utarakan pada latar belakang diatas. Aksi tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi politik sebab tindakan itu dilakukan untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta maupun tetap mendukung diadakan penetapan.

Kedua adalah teori demokrasi deliberatif menurut Habermas. Menurut Habermas, kondisi masyarakat yang semakin kompleks dewasa ini tidak dapat dimengerti secara konkret. Kontrol pemerintah dilaksanakan secara tidak langsung lewat kekuasaan opini publik. Dari beberapa opini masyarakat yang semakin kompleks tersebut sehingga munculah teori demokrasi deliberatif untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Istilah “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation*. Istilah ini berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau dalam kosa kata politisnya berarti “musyawarah”. Semua arti universal tersebut harus ditempatkan dalam konteks publik atau kebersamaan secara politis untuk memberi pengertian

²⁸ *Ibid*, hlm. 133.

yang penuh sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus. Penggabungannya dengan istilah demokrasi memberi makna khusus pada konsep demokrasi itu. Teori demokrasi liberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warganegara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu.²⁹ Model dari teori ini menjelaskan arti kontrol demokrasi melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas, tetapi opini mayoritas tidak selalu identik dengan opini-opini yang benar.

Teori demokrasi deliberatif adalah teori yang jauh lebih memastikan dengan cara apakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat mematuhi opini-opini tersebut. Ruang publik adalah sarana untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sendiri secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat agar suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada. Ruang demokratis seperti itu, tempat para warganegara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara terbuka yaitu berupa gagasan pokok ruang publik politis. Kemudian yang menarik dari gagasan Habermas adalah ruang publik dapat berfungsi secara politis. Habermas mencirikan peran ruang publik itu sebagai papan pantul untuk masalah-masalah. Hal ini berarti ruang publik yang berfungsi secara politis tidak hanya mampu menemukan masalah-

²⁹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 128.

masalah sosial-politis, melainkan juga dapat memediasi gaya hidup masyarakat yang majemuk.

Dengan kata lain ruang publik dapat berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah politis secara memuaskan, apabila ruang publik mencerminkan masalah-masalah tersebut secara transparan. Dan medium dari ruang publik itu sendiri yakni media massa. Namun yang jadi kegelisahan sekarang ini adalah media massa tidaklah netral di hadapan ruang-ruang publik, karena pada kenyataannya media massa dikendalikan oleh para aktor media massa. Menurut Habermas pemegang mandat publik tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan benar, jika ia bersikap tidak hanya dari Negara dan pasar, melainkan dari para aktor ruang-ruang publik. Dalam konsep demokrasi deliberatif fungsi media massa adalah memediasi proses-proses pembelajaran di dalam ruang-ruang publik dengan cara menetralsir pengaruh-pengaruh kekuasaan negara pada ruang publik.³⁰

Relevansi teori diatas dengan penelitian ini adalah ruang publik berfungsi politis dengan cara masyarakat Yogyakarta berpartisipasi politik dengan aksi yang dilakukan selama beberapa hari berturut-turut maupun bertukar opini lewat media massa. Partisipasi politik itu dapat disebut sebagai opini publik. Dalam masalah ini media massa mempunyai peran yang besar yakni selalu memberikan informasi kepada masyarakat terkait polemik keistimewaan Yogyakarta, dan kaitannya dengan konsep demokrasi kiranya teori diskursus demokrasi deliberatif milik Habermas dapat menganalisis persoalan polemik tersebut.

³⁰ *Ibid*, hlm. 143.

Terkait dengan persoalan diatas, telah dijelaskan pula dalam firman Allah SWT, QS : An-Nisa : 4 (59) yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu dan lebih baik akibatnya)”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena penelitian ini dilakukan untuk mempelajari masalah dan fenomena yang ada dalam masyarakat dan memberikan gambaran terhadap situasi atau kejadian yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus.³¹ Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis tentang keadaan objek sebenarnya.³²

Seperti halnya penelitian mengenai keistimewaan Yogyakarta. Peneliti akan melakukan penelitian yang mana analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Mulai dari memaparkan dengan detail

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

³² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

dan akurat mengenai respon masyarakat terhadap keistimewaan Yogyakarta. Setelah itu akan diteliti mengenai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kaitannya demokrasi tentang keistimewaan Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah masyarakat kabupaten Kulon Progo, baik pribumi maupun pendatang. Pendatang yang dimaksud adalah warga Kulon Progo yang berdomisili dan ber-KTP Kulon Progo.

Objek dari penelitian ini adalah mengenai respon masyarakat terhadap keistimewaan Yogyakarta. Objek dipilih dengan menggunakan sistem sampel. Pengambilan sampel dilakukan dari kalangan masyarakat awam, tokoh agama, tokoh politik, akademisi, dan kalangan birokrat di kabupaten Kulon Progo masing-masing 3 responden.

3. Sumber Data

Untuk mengetahui dan menganalisis segala yang ada dan berhubungan dengan keistimewaan Yogyakarta, maka diperlukan sumber data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data utama atau data primer, yaitu berupa kata-kata dari objek yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, percakapan dan pengamatan yang dilakukan dengan

masyarakat Kulon Progo. Sementara data tambahan atau data sekunder berupa dokumen data tertulis, foto, dan data-data statistik.³³

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu respon masyarakat Kulon Progo terhadap keistimewaan Yogyakarta, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis.³⁴ Penulis melakukan pengamatan terhadap kehidupan politik masyarakat kabupaten Kulon Progo terkait polemik seputar keistimewaan Yogyakarta yaitu berupa sidang paripurna yang digelar di kantor DPRD kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Januari 2011.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan interview guide (pemandu wawancara).³⁵

Jenis penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu dengan tidak terikat kepada kerangka

³³ Lexy Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 112.

³⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Perss, 2007), hlm. 129.

³⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

pertanyaan-pertanyaan, melainkan dengan kebijakan interviewer (pewawancara) dan situasi ketika wawancara dilakukan.³⁶

Adapun pihak-pihak yang dijadikan nara sumber atau informan adalah kalangan masyarakat awam, tokoh agama, tokoh politik, akademisi, dan kalangan birokrat di kabupaten Kulon Progo masing-masing 3 responden.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini. Peneliti mencoba menganalisa data sesuai dengan data yang ada. Oleh karena objek penelitian adalah keistimewaan Yogyakarta yang tentunya lebih mengutamakan data kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti.

Dalam analisis deskriptif studi kasus menggunakan metode pembahasan deduktif. Metode deduktif adalah pembahasan yang berangkat dan bertitik tolak dari pengetahuan umum kemudian menilai kejadian atau peristiwa yang khusus.³⁷

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 207.

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I*, (Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang peta Yogyakarta sebagai keistimewaan serta gambaran umum mengenai tempat penelitian, meliputi: kondisi geografis, kondisi sosial budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi politik. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan situasi secara umum masyarakat kabupaten Kulon Progo, serta memberikan gambaran awal tentang pembahasan yang akan dikaji.

Bab III berisi tentang perbandingan beberapa daerah istimewa di Indonesia dan mendudukan keistimewaan Yogyakarta diantara beberapa daerah istimewa tersebut.

Bab IV membahas tentang respon masyarakat Kulon Progo terhadap keistimewaan Yogyakarta dari perspektif historis, sosiologis, politis dan demokratis. Serta membahas respon masyarakat terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta kaitannya dengan konsep demokrasi dengan mengkaitkan teori-teori kedalam keistimewaan Yogyakarta.

Bab V merupakan penutup, dalam hal ini meliputi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, dan saran-saran. Dan bagian akhir dari penelitian ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai gambaran umum masyarakat kabupaten Kulon Progo, bahwa secara keseluruhan masyarakat Kulon Progo mempunyai kesadaran politik yang relatif rendah. Hanya ada beberapa kalangan masyarakat yang mengetahui persis tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta dan dinamika seputar polemik keistimewaan tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari gambaran mengenai tingkat perekonomian masyarakat yang sebagian besar didominasi oleh petani/pekebun sehingga berpengaruh pada tingkat pendidikan yang mayoritas rendah yakni berpendidikan SD dan SLTP/ sederajat. Kondisi tersebut berpengaruh pula pada kesadaran politik bahkan kondisi politik masyarakat yang cenderung rendah.

Kemudian mengenai respon masyarakat Kulon Progo tentang keistimewaan Yogyakarta yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Kulon Progo tetap mempertahankan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Istimewa dalam bingkai NKRI. Kemudian mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme penetapan yakni menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan Yogyakarta mengandung banyak aspek, yakni historis, politis, sosiologis dan demokratis. Dimana semua masyarakat Kulon Progo mengetahui dan menguasai tentang aspek historis keistimewaan Yogyakarta mulai dari masyarakat awam, kalangan akademisi, kalangan birokrat, kalangan politisi dan tokoh agama. Karena masyarakat sadar bahwa kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi ke-Indonesia-an secara lebih kongkret.

Dan mencermati beberapa opini publik dan dasar hukum keistimewaan Yogyakarta, sudah jelas yakni ada pada kepala daerah (gubernur) dari keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono, dan wakil kepala daerah (wagub) dari keturunan Sri Paduka Paku Alam. Jika ada pemahaman bahwa kepala daerah bisa dari orang umum, maka menurut masyarakat Kulon Progo keistimewaan Yogyakarta akan hilang, karena provinsi DIY tidak beda dengan provinsi lain.

Sedangkan menurut sumber referensi, transformasi Yogyakarta selama 65 tahun mungkin sudah melahirkan 30-an persen warga Yogyakarta yang menghendaki Gubernur-Wakil Gubernur dijabat keturunan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. kemungkinan lain, sejak massa tumpah ruah dalam *Pisowanan Ageng* di Alun-alun Utara pada bulan Mei 1998, sudah 70-an persen warga Yogyakarta menghendaki Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.²⁰⁵

²⁰⁵ Mohammad Fajrul Falaakh, *op.cit.*, hlm. 12.

B. Saran

Setelah diadakan pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah, maka selesai sampai disini pembahasan mengenai respon masyarakat Kulon Progo tentang keistimewaan.

Sebagai akhir kata dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini, maka penulis menyarankan:

1. Meskipun banyak yang pro dengan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, masyarakat hendaknya tidak langsung puas dengan hasil penulisan ini dan diharapkan untuk lebih melakukan studi yang lebih sempurna dan mendalam lagi mengenai keistimewaan Yogyakarta.
2. Bagi masyarakat Kulon Progo untuk lebih aktif dalam melakukan perubahan non-material terutama untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang berkembang saat ini.
3. Bagi para tokoh birokrasi pemerintahan khususnya kabupaten Kulon Progo tetaplah memberikan pelayanan yang terbaik bagi peneliti untuk melakukan riset-riset selanjutnya.

Demikian akhir dari penulisan penelitian ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi penyusun dan intelektual muslim Indonesia yang haus akan ilmu-ilmu pengetahuan baik sosial maupun politik. Semoga apa yang telah kita pikirkan dapat terealisasikan, dan selalu mendapat ridho Allah. Amin....”*Amin ya rabbal Alamin*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. *Daerah “Khusus” Memang Harus Beda*, (Online), (<http://syukriy.wordpress.com/2010/12/09/daerah-khusus-memang-harus-beda/>, diakses 5 Februari 2011).
- Aditri, Ferry. 2010. *Dua Puluh Ribu Warga Yogyakarta Siap Demo*, (Online), (<http://liputan6.com/13/12/2010/dua-puluh-ribu-warga-yogyakarta-siap-demo>, diakses 3 Februari 2011).
- Agus, Ali, “Percobaan Riskan untuk NKRI”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Sabtu 19 Februari 2011.
- Anshoriy, HM. Nasrudin dan Zainal Arifin Thoha. *Berguru Pada Jogja, Demokrasi dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: KUTUB, 2005.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Elu, Kamillus. 2011. *Pandangan Fraksi DPD RI Terhadap RUUK Yogyakarta*, (Online), (<http://ahok.org/berita/pandangan-fraksi-fraksi-dan-dpd-ri-terhadap-ruuk-yogyakarta/>, diakses 17 Mei 2011).
- Falaakh, Mohammad Fajrul, “Sesudah Monarki Konstitusional”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Kamis 6 Januari 2011.
- Fauzi, Gamawan. 2011. *Keistimewaan Yogya tidak Hilangkan Nilai Demokratis*, (Online), (http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=978:keistimewaan-yogya-tidak-hilangkan-nilai-demokratis&catid=4:nasional&Itemid=78, diakses 3 Februari 2011).
- Foundation, Parwi. *Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Parwi Foundation, 2002.
- Geutanyo, Abang. 2010. *Referendum Yogya dan Aceh. Serupa Tapi Tak Sama*, (Online), (<http://regional.kompasiana.com/2010/12/06/referendum-yogya-dan-aceh-serupa-tapi-tak-sama/>, diakses 5 Februari 2011).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- _____. *Metodologi Riset I*. Yogyakarta: Yayasan Fak. Psikologi UGM, 1982.

- Hadinoto, Pandji. 2010. *Membedah RUU Keistimewaan Yogyakarta*, (Online), (<http://jakarta45.wordpress.com/2010/12/19/kenegarawanan-dasar-pikiran-pemerintah-susun-ruu-yogyakarta/>), diakses 17 Mei 2011).
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Harnoko, Darto, dkk. *Demokrasi dalam Perjalanan Sejarah (Studi Kasus di DIY 1945-Awal Reformasi)*, Yogyakarta: Kementerian kebudayaan & pariwisata, 2003.
- Hermawan, Bayu. 2010. *Tolak Pilgub Yogya, Massa Lumpuhkan Malioboro*, (Online), (<http://nasional.inilah.com/read/detail/1039312/tolak-pilgub-yogya-massa-lumpuhkan-malioboro>), diakses Februari 2011).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Perss, 2007.
- Jhosin. 2010. *Persamaan Kewenangan Otonomi Khusus Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam pada Lembaga Eksekutif*, (Online), (<http://yosin.wordpress.com/2010/06/04/persamaan-kewenangan-otonomi-khusus-papua-dan-nanggroe-aceh-darussalam-pada-lembaga-eksekutif/>), diakses 5 Februari 2011).
- Kurniadi, Bayu Dardias. 2009. *Naskah Draft RUU Keistimewaan Provinsi DIY*, (Online), (<http://bdardias.staff.ugm.ac.id/index.php/>), diakses Februari 2011).
- Kurniawan, Wahyu & Rina Wijayanti .2011. *Sultan Ajukan 9 Keberatan Soal RUUK*, (Online), (<http://www.harianjogja.com/beritas/detailberita/HarjoBerita/21961/sultan-ajukan-9-keberatan-soal-ruukview.html>), diakses 17 Mei 2011).
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Margana, Sri. 2010. *Yogyakarta, Monarki yang Melahirkan Demokrasi*, (Online), (<http://www.rimanews.com/read/20101203/7964/yogyakarta-monarki-yang-melahirkan-demokrasi>), diakses 3 Februari 2011).
- Menangsang, John. *Papua Sebuah Fakta dan Tragedi Anak Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, 1995.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Oktaveri, John Andhi. 2010. *Masalah Jogja Hanya Pengalihan Isu*, (Online), (<http://www.harianjogja.com/beritas/detailberita/Luar/19992>, diakses 17 Mei 2011).
- Sammy, Abdullah. 2010. *DPD Tolak Isi Draf RUUK DIY*, (Online), (<http://bataviase.co.id/node/498945>, diakses Februari 2011).
- Sedyawati, Edi, dkk. *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Setiawan, Arief. 2010. *Situasi Sosial Politik di Papua "IBARAT API DALAM SEKAM*, (Online), (<http://djoglongarep.blogspot.com/2010/07/situasi-sosial-politik-di-papua-ibarat.html>, diakses 3 Februari 2011).
- Skripsi Amir Kusbandono, *Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Secara Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2010.
- Sumardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Suryadi, Budi. *Sosiologi Politik. Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2007.
- Syah, Kaoy, dan Lukman Hakiem. *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Cahaya Ilmu, 2000.
- Tesis Ode Jamal. *Elit dan Pemekaran di Papua: Kajian tentang Dinamika Respon Elit Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Provinsi Irian Barat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.
- Wahyukismoyo, Heru. *Keistimewaan Jogja Vs Demokratisasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2004.
- Zainuddin, Muslim, dkk. *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

Website:

- Keistimewaan Yogyakarta Bukan Bentuk Monarki*. 2010, (Online),
(<http://www.jpnn.com/read/2010/11/29/78308/Keistimewaan-Jogja-Bukan-Bentuk-Monarki->, diakses Januari 2011).
- Alun Alun Utara Dipadati Ribuan Warga Yogya*. 2010, (Online),
(<http://nasional/13/12/2010/alun-alun-dipadati-ribuan-warga-yogya>, diakses 3 Februari 2011).
- Warga Desak Ichlasul Aman Minta Maaf*. 2010, (Online),
(<http://nasional/23/12/2010/warga-desak-ichlasul-amal-minta-maaf>, diakses 3 Februari 2011).
- Benteng Museum Vredeburg*. 2010, (Online),
(http://museumvredeburg.blogspot.com/2010/04/benteng-vredeburg-pada-masa-pendudukan_14.html, diakses 17 Mei 2011).
- Pemerintah DKI Jakarta*. 2010, (Online),
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_DKI_Jakarta, diakses 3 Februari 2011).
- Keistimewaan Aceh*. 2009, (Online),
(<http://kompasiana.com/12/3/2009/keistimewaan-aceh>, diakses 3 Februari 2011).
- Otonomi Khusus Papua*. 2011, (Online),
(http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_khusus_Papua, diakses 3 Februari 2011).
- Yogyakarta Pasca “Revolusi Kecil”*. 2010, (Online),
(http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=27803&Itemid=59, diakses 5 Februari 2011).
- Demokrat Bersikukuh Gubernur DIY Dipilih*. 2010, (Online),
(http://parraindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:demokrat-bersikukuh-gubernur-diy-dipilih&catid=32:politik-hari-ini&Itemid=81, diakses 17 Mei 2011).
- Polemik Keistimewaan Yogyakarta Berlanjut*. 2010, (Online),
(http://berita.liputan6.com/liputanpilihan/201012/311141/polemik_ke_istimewaan_yogyakarta_berlanjut, diakses 17 Mei 2011).

40 Raja se-Nusantara Dukung Keistimewaan Jogja. 2010, (Online),
 (<http://www.tribunnewsbatam.com/2010/12/05/40-raja-se-nusantara-dukung-keistimewaan-jogja>, diakses Februari 2011).

Pemerintah Jangan Mengambil Resiko Politik. 2011, (Online),
 (<http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=hukum&id=1850>, diakses 17 Mei 2011).

Koran:

“Setgab Minta Kaji Ulang RUUK”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Sabtu 11 Desember 2010.

“PDIP dan Golkar Tegaskan Keistimewaan Yogyakarta”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Rabu 29 Desember 2010.

Harian *Kedaulatan Rakyat*, edisi Rabu 5 Januari 2011.

“7 Fraksi Pro Penetapan, Demokrat tak Jelas”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Jum’at 7 Januari 2011.

Harian *Kedaulatan Rakyat*, edisi Sabtu 8 Januari 2011.

Harian *Kedaulatan Rakyat*, edisi Sabtu 15 Januari 2011.

Harian *Kompas*, edisi Kamis 27 Januari 2011.

Harian *Kedaulatan Rakyat*, edisi Sabtu 12 Maret 2011.

“Pemerintah tak Serius Tuntaskan RUUK”, *Kedaulatan Rakyat*, edisi Selasa 10 Mei 2011.

Wawancara:

Wawancara dengan Supiyah, (di rumah (Nomporejo) tgl 6 Februari 2011, jam: 14.00).

Wawancara dengan Masutri (di rumah beliau (Wonopeti) tgl 6 Februari 2011, jam: 14.30).

Wawancara dengan Sugiman (di rumah (Bulak) tgl 8 Februari 2011, jam: 10.00).

Wawancara dengan Santi Astuti (di Rumah (Bulak) tgl 8 Februari 2011, jam: 13.00).

Wawancara dengan Supriyo (di rumah (Banaran) tgl 8 Februari 2011, jam: 15.40).

Wawancara dengan Agus Ridwan (di kampus (UMY) tgl 9 Februari 2011, jam: 12.30).

Wawancara dengan Wijono (di rumah (Kalisono) tgl 10 Februari 2011, jam: 16.00).

Wawancara dengan Hj. Utari (di rumah (Brosot) tgl 11 Februari 2011, jam: 10.00).

Wawancara dengan Bambang (di rumah (Lendah) tgl 12 Februari 2011, jam: 11.00).

Wawancara dengan Nurul Khoiriyah (di kost (Nologaten) tgl 13 Februari 2011, jam: 09.00).

Wawancara dengan Muhammad Bagus (di rumah (Nomporejo) tgl 13 Februari 2011, jam:14.30).

Wawancara dengan Muhammad Wahib (di rumah (Nomporejo) tgl 14 Februari 2011, jam: 16.45).

Wawancara dengan Tumijo (di rumah (Tirtorahayu) tgl 15 Februari 2011, jam: 19.00).

Wawancara dengan Agung (di rumah (Nomporejo) tgl 16 Februari 2011, jam: 11.01).

Wawancara dengan Utama Putra (di rumah (Nomporejo) tgl 16 Februari 2011, jam: 15.34).